



Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review)

Cris Kuntadi^{1*}, Dian Rosdiana²

¹) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Email: cris.kuntadi@dsn.bhayangkarajaya.ac.id

²) Fakultas Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, email: dirosa.mtsn15@gmail.com

*Corresponding author: Cris Kuntadi¹

Abstrak: Artikel ini mereview faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan sebagai variabel dependen terhadap perencanaan anggaran peraturan, dan koordinasi sebagai variabel independen dalam suatu studi literatur manajemen keuangan negara. Artikel ini merupakan *literature review* yang bertujuan membangun hipotesis pengaruh antar variabel agar dapat digunakan pada riset selanjutnya. Artikel ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, peraturan dan koordinasi berpengaruh terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan.

Kata Kunci: Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan, Perencanaan Anggaran, Peraturan dan Koordinasi

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu Negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2) menegaskan bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu system Pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di atur dengan undang undang.

Sedangkan ayat (4) menugaskan Negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, Penyerapan anggaran merupakan salah satu permasalahan yang sangat krusial dalam bidang pendidikan dimana banyaknya anggaran yang ada tidak dapat terserap secara maksimal sedangkan kegiatan prioritas untuk menunjang program pemerintah untuk

meningkatkan mutu dan kualitas Pendidikan harus dijalankan.

Artikel akan membahas pengaruh perencanaan anggaran, peraturan dan koordinasi terhadap efektivitas penyerapan anggaran belanja pendidikan, suatu studi *literature review* dalam bidang Manajemen Keuangan Negara.

Salah satu upaya terlaksananya program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendidikan yaitu anggaran. Anggaran dapat diartikan sebagai rencana penerimaan dan pengeluaran dalam kurun waktu satu tahun. Penyerapan anggaran menjadi topik menarik akhir-akhir ini. Kegagalan target dalam penyerapan anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, dan untuk memperoleh penyerapan anggaran yang maksimal harus diperhatikan apa saja faktor-faktor yang memengaruhinya diantaranya perencanaan anggaran, peraturan dan koordinas sehingga efektivitas penyerapan anggaran Pendidikan dapat tercapai.

Menurut Halim dan Kusufi (2017:48), anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Sedangkan pendapat Sasongko dan Parulian (2015: 2) anggaran merupakan suatu rencana yang akan dijalankan oleh manajemen dalam suatu periode yang tertuang secara kuantitatif. Oleh sebab itu, penganggaran dalam sektor publik harus memperhatikan efektif, efisien dan ekonomis sehingga dana anggaran yang dibuat pada akhirnya tidak menggagalkan anggaran yang telah disusun. Apabila total penyerapan anggaran masih rendah hal ini menunjukkan indikasi belum optimalnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi pada pendapatan domestik bruto.

Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber-sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien.

Menurut Herriyanto (2012), penyerapan anggaran yang gagal mencapai target yang ditetapkan memang menyebabkan manfaat belanja yang hilang. Hal ini disebabkan karena tidak semua dana yang dialokasikan dapat dimanfaatkan, yang berarti ada *idle cash*. *Idle cash* adalah dana menganggur berlebihan yang ada di rekening kas pemerintah, yang belum digunakan untuk membayar kewajiban. Jika *idle cash* terlampaui besar, maka hal ini akan bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kas pemerintah yang baik

Masalah penyerapan anggaran terjadi juga di sektor pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting untuk menunjang kemajuan bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang maju tingkat pendidikan penduduknya. Indonesia sangat peduli terhadap dunia pendidikan, Sesuai dengan Pembukaan UUD Tahun 1945 negara mempunyai amanah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika ada ketidak tercapaian dalam target penyerapan anggaran belanja, maka hal ini mengindikasikan adanya *inefisiensi* dan *inefektivitas* dalam alokasi anggaran. Masalah ketidaktercapaian dalam target penyerapan anggaran telah banyak disoroti oleh banyak pihak sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Pencapaian penyerapan anggaran yang tidak berhasil mencapai target akan berdampak pada hilangnya manfaat belanja.

Secara umum realisasi anggaran disebabkan beberapa faktor, diantaranya faktor perencanaan anggaran, peraturan/kebijakan pemerintah, dan koordinasi. Proses perencanaan anggaran yang sering memakan waktu lama dan menyebabkan keterlambatan pada pengesahannya menjadikan target realisasi anggaran tidak tercapai. Kebijakan yang berubah-ubah serta koordinasi antar instansi/lembaga yang kurang solid juga memberikan dampak pada realisasi anggaran. Adanya revisi dan tanda bintang atau blokir terhadap anggaran yang telah direncanakan menyebabkan tim penyusun anggaran harus merencanakan kembali

penganggaran sehingga menambah waktu dalam penyusunan anggaran. Perencanaan anggaran yang kurang tepat akan menyulitkan dalam hal pembahasan anggaran, dengan demikian akan ada revisi dan penyusunan kembali yang tentunya membutuhkan waktu yang ekstra dalam sebuah proses penentuan anggaran. Kebijakan dan regulasi yang berubah juga akan ikut mempengaruhi proses penyusunan anggaran. Keterlambatan dalam pengesahan anggaran tentu akan berdampak pada proses penyerapan anggaran yang mengakibatkan anggaran tidak dapat terserap penuh bagi program-program yang telah diusulkan.

Menurut data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), kinerja serapan APBD bidang pendidikan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan persentase penyerapan anggaran dinas pendidikan selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2016 tingkat penyerapan anggaran pendidikan sebesar 75,44% dari target anggarannya. Pada tahun 2017, penyerapan anggaran pendidikan sebesar 84,07% dan 86,37% pada tahun 2018. Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa meskipun dalam tiga tahun terakhir serapan anggaran mengalami peningkatan namun secara keseluruhan belum maksimal. Anggaran Pemerintah Daerah yang tidak tergunakan mengalami kecenderungan penurunan yang sebanding dengan meningkatnya sisa anggaran belanja APBD tahun 2016 sampai 2018. Kurang serap belanja dalam APBD pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 123.996.321.891,00 dan nilainya menurun menjadi Rp. 50.117.736.495,57 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 nilainya menurun menjadi sebesar Rp. 41.420.937.435,09. Dengan demikian diharapkan anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap dengan maksimal sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan fenomena diatas yang menyebutkan bahwa penyerapan anggaran tidak efektif dan maksimal, maka penulis dalam artikel ini membahas sejauh mana pengaruh faktor perencanaan anggaran, peraturan (regulasi), dan koordinasi terhadap efektivitas penyerapan anggaran, suatu studi *literature review* terhadap Anggaran Belanja Pendidikan.

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di rumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

- 1) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan?
- 2) Apakah Peraturan berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan?
- 3) Apakah Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan?

KAJIAN PUSTAKA

Efektivitas Penyerapan Anggaran (Y)

Menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014:11), efektivitas merupakan sebuah tolak ukur seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan. Artinya suatu pekerjaan dianggap efektif jika diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik waktu, biaya, maupun mutunya. Pengertian efektivitas sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 adalah merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan secara efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, atau dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa: efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Mardiasmo (2004:134) sebagaimana dikutip Alisman (2014:50), menyatakan bahwa efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila telah mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif. Dari pendapat di atas, maka efektivitas dapat diartikan sebagai sebuah pencapaian yang ingin

dicapai oleh organisasi. Efektivitas berorientasi pada aspek tujuan suatu organisasi, jika tujuan tersebut tercapai, maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Halim (2014), bahwa penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu.

Untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan dan efisiensi belanja. (Mahmudi, 2010). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Selain analisis rasio juga digunakan analisis varian dalam mengukur tingkat efisiensi penyerapan anggaran. Analisis *Varians* (selisih) anggaran pendapatan, dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, hal utama yang perlu dilakukan adalah:

- 1) Melihat besarnya selisih anggaran pendapatan dengan realisasinya baik secara nominal maupun persentase.
- 2) Menetapkan tingkat selisih yang dapat ditoleransi atau dianggap wajar
- 3) Menilai signifikan tidaknya selisih tersebut jika dilihat dari total pendapatan
- 4) Menganalisis penyebab terjadinya selisih anggaran pendapatan

Perencanaan Anggaran (X_1)

Perencanaan anggaran, merupakan faktor penting dalam pengelolaan anggaran. Perencanaan anggaran disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dimana dokumen perencanaan ini memuat kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan secara utuh sasaran hasil kinerja pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang disebut dengan rencana kerja. Sehingga perencanaan yang tidak matang dalam penentuan anggaran yang disajikan akan berdampak pada program kerja yang tidak berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan tidak selarasnya antara perencanaan anggaran dan program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi salah satu faktor penyebab minimnya penyerapan anggaran.

Menurut Nurkholis dan Moh. Khusaini (2019:4) pengertian dari perencanaan anggaran adalah sebagai berikut: "Perencanaan anggaran adalah suatu proses menyusun rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dan ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai".

Menurut I Putu Jati Arsana (2016:143) menjelaskan pengertian perencanaan anggaran sebagai berikut: "Perencanaan anggaran merupakan susunan langkah-langkah sistematis melalui upaya pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia dengan memperhatikan segala keterbatasan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Kemampuan mendefinisikan tujuan dan membuat strategi atau langkah yang akan dilakukan organisasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2013) perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak adanya konsep perencanaan penggunaan anggaran secara riil tentu akan berdampak pada munculnya sejumlah kesulitan dalam mengarahkan penggunaan anggaran dengan tepat sasaran. Anggaran sebagai alat perencanaan di gunakan untuk (Mardiasmo, 2009):

- a) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
- b) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternative sumber pembiayaannya.
- c) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
- d) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

Perencanaan yang anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan yang mencegah penyerapan anggaran. Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu, diantaranya mengenai partisipasi, akurasi data, pengesahan APBD, pendekatan dan instrumen dalam penyusunan anggaran, perencanaan dan kebutuhan serta revisi atau perubahan (Zarinah, 2016).

Peraturan (X₂)

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Disamping dikenal adanya istilah peraturan, dikenal juga istilah perundang-undangan, untuk itu M. Solly Lubis memberikan pengertian perundang-undangan. Pengertian perundang-undangan ialah proses pembuatan peraturan Negara. Dengan kata lain tata cara mulai perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan.

K. Wantjik Saleh memberikan pengertian yang berbeda tentang perundang-undangan, perundang-undangan adalah "Undang-undang dalam arti luas" atau yang dalam ilmu hukum disebut "Undang-undang dalam arti materiiil" yaitu segala peraturan yang tertulis yang dibuat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan profinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.

Terkait dengan peraturan besarnya dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, ataupun pemerintah kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan Menteri ini dijelaskan bahwa besar sumber dana yang diterima oleh lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan adalah diatas 20% dari APBN. Setiap tahun besarnya anggaran dapat berubah-ubah, karena kebutuhan dari tahun ke tahun yang tidak sama. Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan terkait proses pencairan anggaran di Dinas Pendidikan diungkapkan oleh Pengurus PGRI Ranting SMP bahwa untuk peraturannya itu landasan hukumnya mengacu pada Perda dan hukum di atasnya. Jadi tidak melanggar dari hukum yang paling atas, kemudian di pusat dan Perda untuk pencairan dana yang di daerah. Hal serupa diungkapkan oleh Kasubbag Perencanaan dan Kepegawaian Dinas Pendidikan bahwa sebetulnya tidak ada keterlambatan, hanya karena penyusunan SPJ dan harus menunggu transfer dari Subbag Keuangan. Dan terkadang peraturan yang berubah-ubah seringkali menjadi faktor yang menghambat penyerapan anggaran. Kepatuhan terhadap peraturan perundangan merupakan hal mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penganggaran. Pendekatan anggaran berbasis kinerja secara implisit menyatakan bahwa pengalokasian sumberdaya harus berdasarkan prioritas pembangunan dan pelayanan publik di daerah (Abdullah, et al., 2016).

Koordinasi (X₃)

Pengkoordinasian adalah setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan organisasi, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi. (Fayol, 2008).

Kesatuan komando adalah setiap bawahan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak Atasan yang memberikan perintah, maka karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Hal ini juga akan menimbulkan kebingungan dan tidak fokus pada tugas yang diberikannya. (Fayol, 2008). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengeluaran pemerintah yang mendukung dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal. Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian. Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah dan sumber daya manusia yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana jika segala sesuatunya dilakukan secara efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya masih terjadi rendahnya penyerapan anggaran seperti yang terjadi pada instansi Dinas Pendidikan dimana penyerapan anggarannya masih rendah dan mendapat raport merah, serapan anggaran yang di peroleh masih dibawah 90%.

Selanjutnya, Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen- departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Handoko 2003:195). Sedangkan Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan keseluruhan unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas didalam suatu perusahaan atau organisasi agar mempunyai keselarasan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan kordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha kearah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Fayol (1992) mengemukakan bahwa setelah dilakukan pendelegasian wewenang dan pembagian pekerjaan kepada para karyawan oleh manajer, langkah selanjutnya adalah pengkoordinasian. Setiap bawahan mengerjakan hanya sebagian dari pekerjaan perusahaan, karena itu masing-masing pekerjaan bawahan harus disatukan, diintegrasikan, dan diarahkan untuk mencapai tujuan. Tanpa koordinasi tugas dan pekerjaan dari setiap individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai. Koordinasi itu sangat penting di dalam suatu organisasi.

Dari beberapa definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengkoordinasian adalah usaha untuk mengatur para pelaksana kegiatan agar bekerja secara teratur, sinkron dan selaras agar pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan. Menurut Terry (Hasibuan, 2009: 49) ada beberapa tipe-tipe koordinasi, antara lain:

- 1) Koordinasi Vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah dan tanggungjawabnya.
- 2) Koordinasi Horizontal adalah mengoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (*aparatus*) yang setingkat. Koordinasi horizontal dibagi atas *interdisciplinary* dan *interralated*. *Interdisciplinary* adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. *Interrelated* adalah koordinasi antar badan (instansi) atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setara.

Tabel 1: Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Author (tahun) | Hasil Riset terdahulu | Persamaan dengan artikel ini | Perbedaan dengan artikel ini |
|----|---|--|--|--|
| 1 | Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah (2015) | Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Aceh: perencanaan, peraturan, koordinasi, SDM dan Barang dan Jasa | perencanaan, peraturan dan koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran | Terdapat variabel lain yang memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran yaitu SDM dan Barang dan Jasa |
| 2 | Dadan Ramadhani, Indi Zaenur Anisa (2017) | Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten | Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran | menggunakan 2 Variabel Bebas lain yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran terkait Efektivitas Penyerapan Anggaran |
| 3 | Aulia Afrizal, Syukri Abdullah, Maulia Saputra dan Hasnawati (2018) | Anggaran Pendidikan, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Intervensi: Sebuah Telaah Literatur | Kepatuhan terhadap Peraturan berpengaruh pada efektivitas penyerapan Anggaran | Penulis menggunakan variabel bebas lainnya intervensi pemangku kebijakan |
| 4 | Husniati, Sunandar, Erfina, Jamaluddin Ahmad (2018) | Pengaruh Koordinasi Dan Kesatuan Komando Terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang | Pengaruh Koordinasi terhadap Penyerapan Anggaran Pendidikan | Penulis membahas tentang pengaruh Kesatuan Komando terhadap Penyerapan Anggaran Pendidikan |
| 5 | Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan (2019) | Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, SDM dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD provinsi Sumatra Barat | Pengaruh Regulasi dan perencanaan anggaran terhadap penyerapan Anggaran | Penulis membahas variabel lain yaitu Politik Anggaran, SDM dan pengadaan barang dan jasa |
| 6 | Yekti Setyawati (2021) | Studi Fenomenologi Penyerapan Anggaran Pendidikan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah | Penyerapan Anggaran Pendidikan pada Satuan Kerja | Penulis menggunakan variabel lain Studi Fenomenologi |

*Ket variabel: Y=Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan; X1= Perencanaan Anggaran; x2= Peraturan; dan x3= Koordinasi.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (Library Research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari buku-buku dan jurnal baik secara *off line* di perpustakaan dan secara *online* yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Dalam penelitian kualitatif, kajian pustaka harus digunakan secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis. Pada metode kualitatif, semua data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif berdasarkan pendapat para ahli sebagai landasan teori. Artinya harus digunakan secara induktif sehingga tidak mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Populasi penelitian adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:72).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Perencanaan sebagai syarat mutlak sebelum kegiatan berlangsung. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka suatu kegiatan yang dilaksanakan mengalami hambatan, bahkan gagal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Berkaitan dengan manajemen pembiayaan anggaran, perencanaan memiliki peran yang sangat penting, karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki, baik berkaitan dengan sumber daya manusia maupun sumber dana. Proses perencanaan dalam rangka penyusunan program dan pengembangan dari kegiatan evaluasi kinerja. sebagai bagian dari sistem pendidikan dasar mengimplementasikan sistem SP4 dalam proses perencanaan dan penganggarannya, dimana dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bottom up. Penetapan skala prioritas didasarkan atas analisis kebutuhan yang dianggap mendesak. Berdasarkan standar operasional prosedur perencanaan dan penganggaran penyusunan rencana pembiayaan Pendidikan diimplementasikan dalam kegiatan penyusunan rencana kerja.

Hasil dari penelitian adanya hubungan yang sangat signifikan antara Perencanaan Anggaran dengan Efektivitas Penyerapan Anggaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal, M. (2018), Nugroho, R., & Alfarisi. (2017), Putri, K.M.R., Yuniarta, G.A., & Prayudi, M.A., (2017), Zarinah, M.,

Pengaruh Peraturan terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

Penelitian menunjukkan bahwa variabel regulasi keuangan daerah, memiliki pengaruh signifikan positif terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel distribusi frekuensi variabel maupun dari pengolahan data menggunakan SPSS 21. Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Yunita & Putra, 2018). Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada.

Sistem regulasi keuangan daerah adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengendalikan pelaksanaan siklus keuangan daerah agar segala tindakan atas pengendalian tersebut dapat dirangkum dalam peraturan tertentu (Yunita & Putra, 2018). Faktor regulasi

yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Teori keagenan mendukung terciptanya regulasi untuk proses penyerapan anggaran. Pemerintah dibutuhkan peranannya untuk mengatur ketentuan- ketentuan terhadap kebijakan publik. Ketentuan diperlukan agar semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat mendapatkan informasi yang sama dan seimbang. Regulasi terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah, dimana permasalahannya terjadi mengenai pergantian regulasi, pemahaman dan kepatuhan ASN, sehingga menyebabkan penyerapan anggaran menjadi terganggu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan dan pemahaman terhadap regulasi akan meningkatkan penyerapan anggaran belanja.

Hasil penelitian Ramadhani & Setiawan (2019) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara regulasi dengan penyerapan anggaran. Sejalan dengan hasil penelitian Widianingrum (2017) dan Salamah (2018) yang menyatakan bahwa faktor regulasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. H1. Regulasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja.

Pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

Pengaruh Koordinasi terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan adalah Pengaruh koordinasi terhadap penyerapan APBD Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa Kordinasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD Dinas Pendidikan. Hasil pengujian statistik secara parsial menunjukkan nilai signifikansi regresi variabel Koordinasi sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini dipertegas dengan perhitungan perbandingan nilai Thitung dan Ttabel ($4.322 > 1.688$). Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh koordinasi dari seluruh komponen organisasi yang baik/tinggi akan berpengaruh terhadap penyerapan APBD di Dinas Pendidikan berbasis kinerja yang baik/tinggi, demikian sebaliknya bila tingkat koordinasi dari seluruh komponen organisasi rendah/buruk maka penyerapan APBD akan rendah/buruk. Menurut Manulang (2001:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan, dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Koordinasi berpengaruh positif terhadap penyerapan APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang. Dimana nilai signifikansi regresi variabel Koordinasi sebesar 0,000 nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah rerangka berfikir artikel ini seperti di bawah ini.

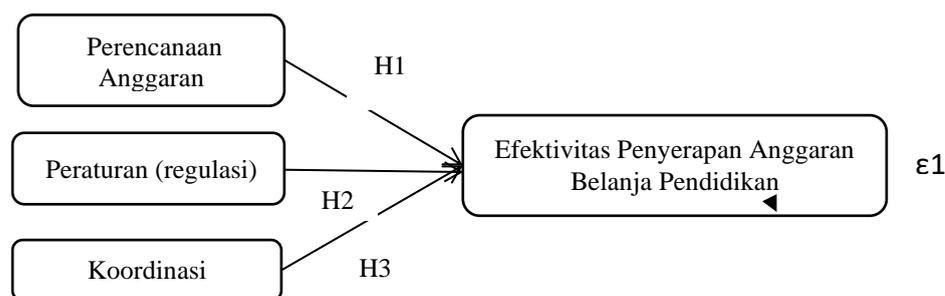


Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar conceptual framework di atas, maka: Perencanaan Anggaran, Peraturan dan Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Pendidikan

Selain dari tiga variabel exogen ini yang mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Pendidikan, masih banyak variabel lain yang mempengaruhinya diantaranya adalah:

- a) Sumber Daya Manusia, karena bila pengelolaan Anggaran tidak diikuti dengan kemampuan SDM akan mempengaruhi penyerapan Anggaran
- b) Pelaksanaan Anggaran; dalam hal pelaksanaan anggaran hendaknya melihat skala prioritas berdasarkan kebutuhan sehingga penyerapan bisa maksimal.
- c) Pengadaan Barang dan Jasa, kurangnya pejabat pengadaan barang dan jasa sehingga penyerapan anggaran tidak sesuai dengan regulasi dan peruntukannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

- 1) Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan
- 2) Peraturan berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan
- 3) Koordinasi berpengaruh terhadap Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan

Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan, selain dari Perencanaan Anggaran, Peraturan dan Koordinasi pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat mempengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan selain yang varibel yang di teliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti Sumber Daya Manusia, Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdullah. 2016. *Implementasi Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Palangka Raya*. FITRAH Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 02 No. 2 Desember 2016 e-ISSN: 2460-2345, p-ISSN: 2442-6997 Web: jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/
- Aulia Afrizal, Syukri Abdullah, Maulia Saputra dan Hasnawati (2018) *Anggaran Pendidikan, Kepatuhan terhadap Regulasi, dan Intervensi: Sebuah Telaah Literatur*
- Arsana, I Putu Jati. (2016). *Etika Profesi Insinyur (Membangun Sikap Profesionalisme Sarjana Teknik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. *Deskripsi Analisis APBD Tahun Anggaran 2013*, Jakarta. 2013.

- Dadan Ramadhani, Indi Zaenur Anisa (2017). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten*
- Fayol, Henry. 2008. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Handoko, T. Hani dan Reksohadiprodjo. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Perusahaan*. Edisi Kedua. BPFE: Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu, SP. 2009. *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Husniati, Sunandar, Erfina, Jamaluddin Ahmad (2018) *Pengaruh Koordinasi Dan Kesatuan Komando Terhadap Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang*
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata.
- Manullang, 2008, *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)
- Nurkholis dan Moh. Khusaini. 2019. *Penganggaran Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah (2015) *Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendidikan di Provinsi Aceh*
- Rifka Ramadhani, Mia Angelina Setiawan (2019) *Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, SDM dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada OPD provinsi Sumatra Barat*
- Sasongko dan Parulian. 2015. *Anggaran*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Silpi Wulandari (2020). *Analisis Faktor-Faktor Ketidakefektifan Penyerapan Anggaran Di Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2018*
- Yekti Setyawati (2021). *Studi Fenomenologi Penyerapan Anggaran Pendidikan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*
- Zarinah, M. 2016. "Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Magister Akuntansi*. Volume 5, No. 1.